



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat

BAHASA DAN SASTRA DALAM GUNTINGAN

Perpustakaan Badan Bahasa

Literasi Sampai Mati

yang lebih sukar. Literasi bukan
untuk mendampingi law enforcement
dan social justice. Literasi media dan
teknologi untuk mengatasi hegemoni
para herbisa makanan dan meranti
obat-obatan (food gathering) tetapi
bukan kemampuan mereka dalam
aktivitas jorba tersebut juga sedang
gubris bagian dari kualitas literasi
di masanya.
Dengan dibekali kemampuan
literasi yang tidak kalah kualitas de-
ngan imperium Romawi atau Mexi-
Kino. Untuk mengemukakan semua
bukti literasi serkali dengan hal
tersebut, tentu tidak akan pernah
lupa, mengingat bahwa
Kita dengan masa yang
teka dan semangat untuk
hidupkan semangat literasi
level akan

Pembina : Sekretaris Badan
Penanggung Jawab : Kepala Subbagian Tata Usaha
Koordinator : Dwi Pudyastuti, S.Pd.
Penyusun : 1. Warsa, S.Pd.
2. Edi Suyanto
Alamat Redaksi : Jalan Daksinapati Barat IV,
Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287/88
Laman : perpustakaan.bahan.bahasa.@kemdikbud.go.id

Manfaatkan Koding dan AI untuk Kemanusiaan

JAKARTA, KOMPAS — Mata pelajaran koding dan kecerdasan buatan banyak diminati murid karena mereka tertarik membuat gim. Pemerintah berharap pelajaran koding menghasilkan karya konkret yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, generasi muda harus bisa berimajinasi dan berinovasi melalui pembelajaran koding. Esensi pembelajaran koding yang mendorong kemampuan berpikir komputasional harus lebih ditekankan.

"Koding tidak boleh semakin memperlebar ketimpangan. Justru melalui koding, kita membuat ketimpangan itu semakin tipis," kata Pratikno dalam peluncuran Program UOB My Digital Space yang berkolaborasi dengan Ruangguru di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ia menegaskan, penguasaan teknologi harus diarahkan pada manfaat yang luas. Melalui belajar koding, murid bisa berkontribusi, seperti membantu petani memprediksi iklim, mendeteksi buah yang sakit, dan membuat pemupukan

lebih efektif.

Melalui akal imitasi (AI), murid bisa membuat program yang membantu aksesibilitas aktivitas ataupun komunikasi bagi penyandang disabilitas atau mendukung nelayan dalam membaca risiko cuaca dan ombak di laut.

Salah satu siswa yang sudah menerapkan hal ini adalah Rajendra Verrill Hafizha dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, yang membuat program Indonesian Sign Language Interpreter. Program berbasis koding dan AI ini membantu para penyandang disabilitas rungu dan wicara berkomunikasi secara virtual.

Tak hanya Verrill, Agatha Christelle Mikaella Aridono, anak kelas 2 di SD Katolik Sang Timur Cakung pun bisa membuat gim sederhana, Independence Day Traditional Gamers, setelah belajar koding. Ada pula gim Roaring Dino yang dibuat Athariq Alifcakra Malangoedo dari Hanifa Islamic School dan Zero Hunger oleh Pijar Manggala Shatiladitya dari SD Kreativitas Anak Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, kemampuan menguasai koding dan AI ada-

lah sebuah keniscayaan. Dia mengutip laporan World Economic Forum (WEF) 2025 yang menyatakan bahwa salah satu kemampuan utama yang diminati pekerjaan pada 2030 adalah penguasaan koding dan AI.

"Koding bukan sekadar teknologi, melainkan juga tentang kemampuan menggunakan logika dan analitis serta berpikir kritis dan kreatif sebagai bagian dari kompetensi kita. Kompetensi ini sungguh sangat penting bagi keberlanjutan kita di masa depan," kata Mu'ti.

Penyelenggaraan pelajaran koding dan AI bukan hanya dilakukan pemerintah. Dalam kesempatan ini, UOB bersama Ruangguru memberikan akses kepada 90.000 pelajar di Indonesia agar belajar koding dan AI bernama program UOB My Digital Space.

Selama lima tahun, mereka yang diutamakan berasal dari keluarga kurang mampu akan dibekali dengan perangkat dan kurikulum yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan komputasional. Setiap tahun, akan terjangkau siswa di 500 sekolah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia. (TIO)

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

Cecep Darmawan

Guru Besar dan Dekan FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia

PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan. Anehnya, Sri Mulyani yang notabene paham persoalan anggaran malah seakan melempar bola panas soal gaji guru dan dosen yang dianggap masih rendah. Alih-alih menaikkan gaji guru-dosen, Sri Mulyani meminta partisipasi masyarakat untuk mengatasinya.

Meski pemerintah mengalokasikan dana pendidikan Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, nyatanya 44,2% anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun. Jika dititik dari proporsi tersebut, anggaran riil untuk operasional dan investasi pendidikan tentu menjadi berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Idealnya anggaran untuk MBG dipisahkan atau dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan.

TIDAK BERBANDING LURUS DENGAN MUTU

Di atas kertas, anggaran yang fantastis itu menarasikan komitmen penuh negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sayangnya, di balik besarnya angka tersebut, tersembunyi kenyataan yang memprihatkan. Anggaran yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan potret mutu pendidikan Indonesia yang cenderung jalan di tempat, tertinggal daya saingnya dengan negara lain, dan sarat ketimpangan atau disparitas yang begitu tajam.

Dengan kata lain, proporsi anggaran pendidikan tidak menavigasi sistem anggaran yang ideal. Alih-alih berdampak pada kualita-

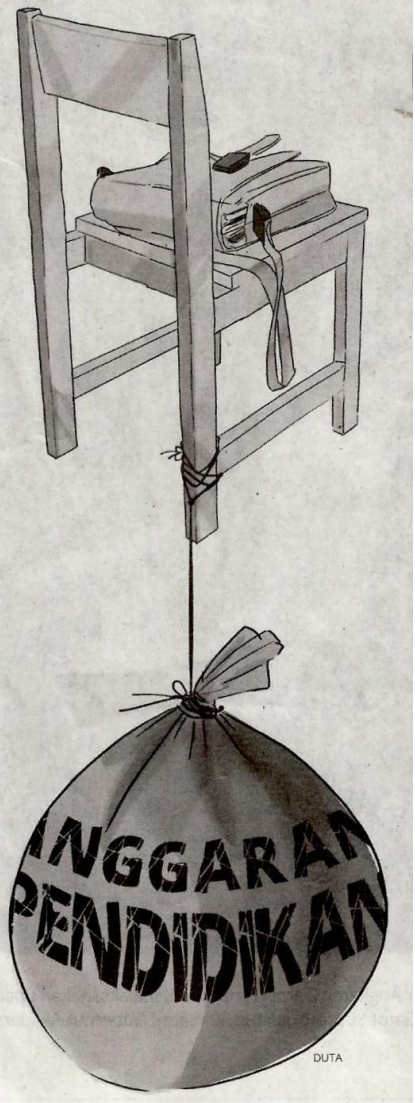
tas, kualitas pendidikan Indonesia kerap menjadi persoalan serius.

Berdasarkan *Human Development Report 2025* yang diterbitkan UNDP (2025), ranking indeks pembangunan manusia Indonesia masih menempati posisi ke-113 dengan skor 0,728. Ranking itu masih di bawah Thailand di posisi ke-76 dengan skor 0,798, lalu Malaysia di posisi ke-67 dengan skor 0,819, dan Singapura di posisi ke-13 dengan skor 0,946.

Dalam *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* pun, skor Indonesia juga relatif tertinggal dari negara tetangga. Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan rata-rata skor PISA sebesar 369 poin. Skor itu masih di bawah Thailand dengan skor rata-rata 394, lalu Malaysia dengan skor rata-rata 404, kemudian Vietnam dengan skor rata-rata 468, dan Singapura dengan skor 560.

Selain itu, indeks makropendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu yang relatif rendah dan ketimpangan antarwilayah yang masih relatif tinggi. Berdasarkan data BPS RI (2024), angka rata-rata lama sekolah (RLS) Indonesia sebesar 8,85 atau dapat dikatakan hampir lulus dengan SMP. Begitu pun dengan angka harapan lama sekolah (HLS) Indonesia berdasarkan data BPS RI (2024) masih sebesar 13,21 atau dapat dikatakan baru memiliki peluang menamatkan pendidikan formal setara dengan diploma satu (D-1).

Lebih parah lagi BPS RI (2024) melansir angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) di Indonesia pada 2024 masih begitu rendah, yakni sebesar 32,00. Artinya hampir dua pertiga dapat dipastikan tiap tahun lulusan SLTA di Indonesia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, data di atas dapat memberikan kesan bahwa anggaran pendidikan yang besar itu tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan yang baik.



“Dibutuhkan *political will* yang kuat dari Presiden Republik Indonesia untuk membenahi kesengkarutan anggaran pendidikan nasional di Indonesia. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.”

PRIORITAS YANG KABUR

Dengan demikian, muncul pertanyaan mengapa anggaran yang besar itu belum menghasilkan mutu pendidikan yang baik? Hal itu disebabkan anggaran yang idealnya menjadi tulang punggung perbaikan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia justru terjebak dalam hitung-hitungan politis, tata kelola yang lemah, dan prioritas yang kabur.

Pemerintah pusat selalu mengeklaim patuh pada konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Namun, bila diperiksa, sebagian besar anggaran itu justru digunakan untuk membiayai pendidikan kedinasan pada kementerian/ lembaga yang secara jelas dikecualikan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Di sisi lain, Kemendikdasmen dan Kemen-dikti-Saintek hanya mengelola sebagian kecil dari porsi 20% anggaran pendidikan nasional dari APBN sehingga ruang untuk peningkatan kualitas melalui kebijakan strategis menjadi terbatas.

Di samping itu, anggaran pendidikan pun menghadapi beban fiskal yang begitu besar dengan adanya program-program baru dari pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperkenalkan sejumlah program baru yang menyedot anggaran besar, tetapi tidak diarahkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat misalnya, meski penting untuk mengatasi malagizi dan putus sekolah, berpotensi menjadi beban fiskal yang besar tanpa desain kebijakan yang tepat dan integrasi dengan program pendidikan nasional.

SOLUSI

Pemerintah dan DPR semestinya menavigasi anggaran pendidikan dengan menggunakan model penganggaran pendidikan selain taat asas pada regulasi, juga memperhatikan berbagai pendekatan seperti *evidence based policy*, *regulatory impact analysis* (RIA), *corruption risk analysis* (crisis), dan mendorong partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).

Hal itu menjadi penting agar penganggaran pendidikan tidak berbasis pada tarik ulur kepentingan elite penguasa dan pragmatisme. Oleh karena itu, perlu *refocusing* peruntukan anggaran pendidikan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan hanya memperluas akses. Prioritas penggunaan anggaran pendidikan harus mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Selain itu, dibutuhkan *political will* yang kuat dari Presiden Republik Indonesia untuk membenahi kesengkarutan anggaran pendidikan nasional di Indonesia. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Jika situasi itu dibiarkan, sama saja dengan kita tengah menyusun rancang bangun kegagalan pendidikan nasional secara sistemis sejak awal perencanaan penganggarannya.

Buku Berperan Penting Penuhi Hak Pendidikan

- *Membaca adalah cara mencapai atau wadah untuk mendapatkan pengetahuan.*
- *Para founding father kita sangat mencintai buku.*
- *Buku berkualitas rendah atau konten tidak edukatif masih beredar.*

DESPIAN NURHIDAYAT

despian@mediaindonesia.com

SAAT ini realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia ialah rendahnya tingkat literasi. Meskipun meningkat, kegairahan membaca saat ini masih di bawah rata-rata.

"Belum lagi berbagai permasalahan yang sekarang dihadapi oleh para penulis, seperti minimnya royalti, kemudian pajak penghasilan bagi penulis, dan di satu sisi buku ini sendiri juga masih menjadi barang yang mahal," ungkap Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) bertajuk Tata Kelola Pengetahuan dan RUU Buku di Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut, menurut Rerie, isu perbukuan harusnya menjadi perhatian penting dan isu perbukuan adalah instrumen untuk memenuhi hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dia menekankan bahwa buku dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan penting dalam pemenuhan hak pendidikan.

WADAH PENGETAHUAN

Membaca sejatinya adalah cara mencapai atau menjadi wadah untuk mendapatkan pengetahuan.

"Membaca buku tidak hanya melatih fokus dan meningkatkan kinerja otak, tetapi juga sebuah cara bagaimana seorang individu bisa berdialog dengan apa yang dibacanya dan memungkinkan dia untuk lebih memahami dunia secara lebih luas. Mampu menganalisis bahkan menyanggah dan mempertanyakan informasi yang diserapnya melalui buku yang dibaca. Buku sebenarnya adalah alat untuk memberikan jalan kepada anak bangsa untuk bisa mengasah ketajaman pikiran, dan muaranya tentu kecerdasan," papar Rerie.

MENCERDASKAN

Di tempat yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus pengusul RUU tentang Perbukuan, Willy Aditya, menegaskan bahwa jika bertolak pada konstitusi Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, semestinya hal tersebut menjadi sebuah misi yang sangat suci. "Kalau kita sangkutkan dengan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, maka peran

buku itu sangat intim. Seperti Bung Karno itu membaca 363 buku, dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa di hari-hari Bung Karno. Ketika kita merdeka, itu lahir dari ruang diskursus karena buku adalah ruang antara membaca dan menulis," ucap Willy.

"Lalu juga pernah terjadi keributan antara Syahrir dan Hatta ketika dijemput untuk pulang. Hatta membawa berkoper-koper buku dan itu ditendang oleh Syahrir karena Syahrir lebih memilih untuk menyelamatkan orang. Jadi kita bisa melihat para *founding father* sangat mencintai buku," sambungnya.

KUALITAS BUKU

Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji menambahkan bahwa kelemahan implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ialah aturannya komprehensif, tetapi implementasinya lemah di lapangan, terutama dalam pengawasan kualitas buku dan distribusi. Kondisi itu berdampak pada sulitnya buku bermutu menjangkau daerah terpencil, sementara buku berkualitas rendah atau konten tidak edukatif masih beredar.

Aturan ini juga dikatakan hanya menyebut kewajiban pemerintah untuk meningkatkan literasi, tetapi tanpa strategi konkret seperti anggaran dan monitoring. Dengan begitu, program seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sering bersifat seremonial tanpa dampak nyata pada kebiasaan membaca. (H-1)

Perpustakaan RPTRA Dorong Minat Baca

- *Keberadaan ruang membaca dapat mendukung inklusi sosial.*
- *Digitalisasi kunci utama perpustakaan dapat beradaptasi.*
- *Jakbar kekurangan tenaga operasional untuk perpustakaan keliling.*

MOHAMAD FARHAN ZHUHRI
zhuhri@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai pengelolaan perpustakaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang modern dapat menjadi magnet bagi warga sekitar untuk berkunjung dan menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu sumber informasi.

“Masyarakat akan menilai RPTRA sebagai tempat yang terorganisasi, nyaman, dan aman, terutama bagi anak-anak, sehingga layak dikunjungi berulang kali. Ini merupakan satu magnet tersendiri,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kemandirian Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta, Suryanto, di Jakarta, kemarin.

Dalam seminar daring bertema *Pengelolaan dan pengklasifikasian elektronik perpustakaan umum RPTRA*, Suryanto me-

ngatakan pengelolaan perpustakaan yang modern bisa dengan pengklasifikasian koleksi buku secara elektronik. Menurutnya, hal itu dengan mengimplementasikan perangkat lunak berbasis internet seperti Senayan Library Management System (SLiMS).

Perangkat lunak tersebut dapat membantu pustakawan dalam berbagai tugas, seperti mengelola data anggota, koleksi, pinjaman, pengembalian, serta pembuatan laporan. Menurut dia, melalui sistem pengklasifikasian digital dan terintegrasi melalui perangkat lunak seperti SLiMS, pengelola perpustakaan dapat memastikan setiap koleksi tersusun rapi, mudah ditemukan, dan terhubung dengan katalog secara daring.

PERMUDAH AKSES

Dengan begitu, koleksi bacaan dapat diakses oleh para pengunjung perpustakaan. Dalam upaya percepatan layanan, dia mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) di perpustakaan dapat diterapkan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat inovasi dan informasi.

“Pengelola perpustakaan di RPTRA saya yakin bisa membawa perubahan yang besar, signifikan, untuk mengelola perpustakaan secara modern,” kata Suryanto.

Dia mengaku optimistis bahwa perpustakaan nantinya dapat menjadi pengampu arus informasi. RPTRA pun dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat. Jika

seluruh perpustakaan di RPTRA yang merupakan garda depan perkembangan literasi Jakarta telah melakukan pengelolaan, klasifikasi dengan elektronik, dia pun meyakini dampaknya akan sangat besar.

Dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta, kata dia, baru 173 kelurahan yang memiliki RPTRA. Suryanto menambahkan bahwa digitalisasi, termasuk pengklasifikasian koleksi secara elektronik, merupakan salah satu kunci utama bagi perpustakaan agar tetap adaptif menghadapi perubahan zaman.

INKLUSI SOSIAL

Kepala Perpustakaan Universitas Ary Ginanjar Fahru Abdhul Azis mengungkapkan perpustakaan merupakan salah satu fasilitas di RPTRA yang dapat mendukung inklusi sosial, misalnya pengembangan kemampuan seseorang seperti memasak atau membuat kerajinan. Ragam koleksi bahan bacaan yang terdapat di RPTRA, antara lain buku cerita anak, buku pelajaran, ensiklopedia, majalah, komik edukatif, permainan edukatif, koleksi multimedia, dan koleksi khusus difabel.

Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sudin Pusip) Jakarta Barat (Jakbar) Ahmad Jazuri mengatakan masih kekurangan tenaga operasional untuk tiga unit armada perpustakaan keliling. Pada 2023, ada tambahan tiga unit armada perpustakaan keliling, tapi tidak dibarengi dengan tenaga operasional. (Ant/P-3)

Pastikan Pemerintah Memenuhi Kewajibannya

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan wajib belajar tetap penting untuk memastikan warga negara mendapatkan hak pendidikan yang dijamin negara. Karena itu, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 yang digagas DPR harus mampu memastikan pemerintah pusat ataupun daerah memenuhi kewajibannya.

Wajib belajar sembilan tahun yang berlaku saat ini diusulkan meningkat menjadi 13 tahun. Tambahannya mencakup satu tahun pra-sekolah sebelum sekolah dasar (SD) serta tiga tahun jenjang SMA/SMK sederajat. Rancangan ini diharapkan tidak sekadar menjadi janji politik, tetapi benar-benar diimplementasikan.

Direktur Divisi Pendidikan dan Pembangunan Regional Article 33 Indonesia Santoso menegaskan, revisi Sisdiknas harus memastikan kewajiban semua pihak—pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya—untuk memenuhi hak belajar anak usia sekolah.

"Anak-anak Indonesia, di mana pun dan dalam kondisi apa pun, negara harus hadir memastikan mereka dapat mengakses pendidikan. Bukan masyarakat yang menyesuaikan diri dengan negara, melainkan negara yang menyesuaikan diri dengan warganya," ujarnya dalam diskusi revisi UU Sisdiknas di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Menurut Santoso, perubahan wajib belajar menjadi 13 tahun harus dibarengi dengan kejelasan penyediaan infrastruktur, pembiayaan, dan kebutuhan pendidikan dasar warga negara. "Apakah pemerintah punya anggaran yang cukup? Masih ada jutaan anak tidak sekolah. Termasuk yang digugat organisasi masyarakat peduli pendidikan (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia/JPPPI), soal wajib belajar tetapi siswa di sekolah swasta tetap membayar," katanya.

Berdasarkan kajian Article 33 Indonesia, tidak semua negara menetapkan lamanya wajib belajar di konstitusi. Singapura hanya mengatur wajib belajar sembilan tahun, tetapi rata-rata lama sekolah warganya 11,8 tahun. Filipina menetapkan wajib belajar 13 tahun, tetapi rata-rata lama sekolah baru sembilan tahun. Di Indonesia, dengan kebijakan wajib belajar sembilan tahun, rata-rata lama sekolah saat ini 8,85 tahun.

Menurut Santoso, organisasi masyarakat sipil mengapresiasi aspirasi pemerintah meningkatkan wajib belajar menjadi 13 tahun. Namun, belajar dari negara lain, lama wajib belajar sembilan tahun tetap bisa menghasilkan capaian tinggi jika akses pendidikan dijamin merata. Banyak anak usia 5-18 tahun di Indonesia masih tidak bersekolah karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial.

Pemerintah dapat memasuk-

kan wajib belajar 13 tahun dalam revisi RUU Sisdiknas. Pemerintah harus siap dengan konsekuensi pembiayaan yang lebih besar lagi.

"Jika tetap 13 tahun, ada duitnya tidak? Kalau hanya 10 tahun dianggap terlalu rendah. Ada pemikiran yang bisa dipertimbangkan agar wajib belajar secara nasional 10 tahun. Tetapi ada opsi wajib belajar 13 tahun bagi daerah yang mampu, yang diturunkan di peraturan daerahnya," kata Santoso.

Apabila anggaran untuk mendukung wajib belajar 13 tahun masih menjadi masalah, ujar Santoso, opsi wajib belajar 10 tahun juga dinilai sudah berdampak.

Mengumpulkan masukan

Arrista Trimaya dari Badan Keahlian DPR mengatakan, dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas, DPR berkomitmen melibatkan partisipasi publik yang bermakna. DPR menyambut baik peran aktif lembaga Article 33 Indonesia dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang turut memberikan kajian, masukan, dan ide-ide untuk menyempurnakan RUU Sisdiknas.

"Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait revisi UU Sisdiknas sangat dibutuhkan. Komisi X DPR saat ini sedang berproses mengumpulkan masukan dari masyarakat luas," kata Arrista.

Wajib belajar dalam revisi

UU Sisdiknas, kata Arrista, akan menyertakan pendidikan sebelum SD yang namanya sedang dicari, apakah prasekolah atau integrasi dengan pendidikan dasar. Siapa penanggung jawab pendidikan satu tahun sebelum SD ini juga sedang dibahas.

"Ada banyak yang harus dipikirkan jika fokusnya mau ke PAUD formal untuk prasekolah. Selain soal penamaan, ada konsekuensi pendidik jika diakui sebagai guru. Jika memenuhi syarat, guru menerima sertifikasi guru. Di sisi lain, realitasnya banyak guru PAUD yang pendidikannya belum sesuai," kata Arrista.

Sementara itu, Rio Mayrolla, tenaga Ahli Komisi X DPR, menyampaikan, RUU Sisdiknas masih digodok. Aspirasi masyarakat luas akan didengarkan.

Komisi X DPR juga mendukung pembentukan panitia kerja (panja). Ada Panja Anggaran Pendidikan untuk memberikan masukan terkait pemfokusan kembali anggaran pendidikan wajib minimal 20 persen di APBN. Sebab, anggaran pendidikan masih terdistribusi ke berbagai pihak, termasuk untuk sekolah kedinasan.

Ada juga Panja Daerah 3T dan Marginal. Panja ini untuk memastikan akses pendidikan berkualitas juga dapat dinikmati semua warga negara secara adil sehingga angka partisipasi pendidikan dan rata-rata harapan lama sekolah meningkat secara merata. (ELN)

Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

- *Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.*
- *Anggaran pendidikan tak sekadar dilihat dari besarnya, tapi juga ketepatan sasarnya.*
- *DPR dan pemerintah akan segera membahas detail perihal alokasi anggaran pendidikan.*

DESPIAN NURHIDAYAT

despian@mediaindonesia.com

ANGGARAN pendidikan yang dican-
tumkan dalam
nota keuangan dan
RAPBN 2026 dinilai perlu ditin-
jau ulang. Dari total anggaran
pendidikan yang dicanangkan
sebesar Rp757,8 triliun, mayori-
tas justru dialokasikan untuk
program yang tidak berkaitan
langsung dengan penuntasan
persoalan mendasar yang me-
nyelimuti dunia pendidikan di
Indonesia.

Anggota Komisi X DPR, Fur-
tasan Ali Yusuf, mengapresiasi
komitmen pemerintah dalam
menjaga alokasi *mandatory*
spending pendidikan sebesar
20% APBN sebagaimana ama-
nat konstitusi. Namun, ia me-
nyoroti pengalihan anggaran
hingga 44% untuk program

makan bergizi gratis (MBG).

Legislator Fraksi Partai Nas-
Dem itu menyebut perlu dikaji
lebih lanjut apakah MBG bisa
dimasukkan ke kategori angga-
ran pendidikan. “Komisi X ber-
sama pemerintah akan segera
membahas detail dalam rapat
lanjutan pengalokasian itu,”
ujarnya di sela-sela sidang pari-
purna di Gedung Nusantara II,
Senayan, kemarin, disitat dari
website dpr.go.id.

Terkait dengan pernyataan
Presiden yang menyebut anggar-
an pendidikan 2026 terbesar da-
lam sejarah, Furtasan berkomen-
tar, “Yang terpenting adalah
sasaran anggaran itu tepat guna,
bukan sekadar besarnya.”

MBG BIKIN TERKEJUT

Kepala Bidang Advokasi Per-
himpunan Pendidikan dan Guru
(P2G) Iman Zanatul Haeri meng-
aku terkejut dengan alokasi ang-

garan pendidikan yang hampir
separuhnya atau sebesar Rp335
triliun dialihkan untuk MBG.

“Padahal masih banyak per-
soalan mendasar pendidikan
dan guru yang harus dibenahi
dan dibiayai pemerintah,” tutur
Iman dalam diskusi Refleksi Kri-
tis Pemenuhan Hak Pendidikan
di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, mestinya ang-
garan MBG tidak mengambil
dari anggaran pendidikan 20%
mengingat MBG tidak secara
langsung atau eksplisit dipe-
rintahkan oleh konstitusi. Hal
itu, kata dia, menunjukkan
pemerintah belum fokus pada
pembenahan pendidikan dasar
dan menengah.

LANGGAR KONSTITUSI

Jaringan Pemantau Pendidikan
Indonesia (JPPI) menilai alokasi
anggaran pendidikan 2026 me-
nabrak konstitusi. Pasalnya, pe-

Anggaran Pendidikan RAPBN 2026

Total: **Rp757,8 triliun** (20% APBN)

Alokasi Berdasarkan Penerima Manfaat

Siswa/Mahasiswa: Rp401,5 triliun

- Bidikmisi/KIP kuliah: **Rp17,2 triliun** (untuk 1,2 juta mahasiswa)
- LPDP: **Rp25 triliun** (4.000 mahasiswa)
- PIP: **Rp15,6 triliun** (21,1 juta siswa)
- MBG (makan bergizi gratis): **Rp335 triliun** (82,9 juta penerima & 30 ribu SPPG)

Guru/Dosen/Tenaga Kependidikan: Rp178,7 triliun

- Tunjangan profesi guru non-PNS: **Rp19,2 triliun** (754.747 guru)
- Tunjangan profesi guru ASN (PNS): **Rp68,7 triliun** (1,6 juta guru)
- TPD non-PNS: **Rp3,2 triliun** (80.325 dosen)
- TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik: **Rp82,9 triliun**

Sekolah & Kampus: Rp150,1 triliun

- Sekolah rakyat (bangun & operasional 200 lokasi): **Rp24,9 triliun**
- BOS: **Rp64,3 triliun** (untuk 53,6 juta siswa)
- BOP PAUD: **Rp5,1 triliun** (7,7 juta siswa)
- Renovasi sekolah/madrasah: **Rp22,5 triliun**
- BOPTN: **Rp9,4 triliun** (201 PTN/lembaga)
- Sekolah unggul garuda (9 lokasi): **Rp3 triliun**



Keterangan:

Proporsi anggaran MBG: 44% dari total anggaran pendidikan.

Sumber: Kemenkeu/Litbang MI

merintah memilih mengalihkan 44% anggaran pendidikan untuk MBG, sedangkan kewajiban konstitusional untuk pendidikan gratis malah diabaikan.

“Padahal, Pasal 31 UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar,” tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.

Selain itu, JPPI mendesak adanya transparansi besaran anggaran terkait dengan pembiayaan sekolah kedinasan yang kembali disisipkan dalam alokasi dana pendidikan pada RAPBN 2026. Menurutnya, itu melanggar UU Sisdiknas Pasal 49. “Pemerintah harus meninjau ulang alokasi anggaran dan menempatkan prioritas sesuai dengan amanat konstitusi,”

MASIH PEMBAHASAN

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti enggan berkomentar banyak terkait dengan anggaran pendidikan yang tergerus MBG. Ia menyebut persoalan itu masih akan dibahas lebih lanjut. “Soal anggaran, nanti saja, ya. Masih dalam pembahasan lagi,” kata Mu'ti se usai meresmikan program Gerakan Numerasi di SDN Meruya Selatan 04, Jakarta Barat, kemarin.

Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun atau sekitar 4,6%. Pada Juli lalu, dalam raker Komisi X DPR, Abdul Mu'ti sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp71,1 triliun, terutama untuk memenuhi putusan MK soal pendidikan dasar

Menghidupkan Perpustakaan lewat Inovasi

Saat disodori kesempatan menjadi pustakawan di kampus tempatnya bekerja 14 tahun silam, Novy Diana Fauzie (48) gamang. Dia tak memiliki latar belakang keilmuan atau pengalaman apa pun dalam bidang itu, kecuali kecintaannya pada literasi. Namun, bermodal cinta itu, Novy melangkah menjadi salah seorang pustakawan terbaik di Tanah Air.

Mohamad Final Daeng

Sejak 2022, Novy menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Posisi itu diembannya setelah bergabung sebagai pustakawan pada 2014.

Saat ditemui di kampus UMY, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (4/9/2025), Novy menceritakan perjalanannya menekuni profesi tersebut. Bekerja di UMY sejak 1998, dia awalnya meniti karier sebagai anggota staf rektor, kemudian beralih ke bagian hubungan masyarakat (humas) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Urusan Humas UMY.

Pada 2011, Novy berniat menempuh studi lanjutan melalui program beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia pun menyiapkan sejumlah opsi jurusan, salah satunya bahasa Inggris, karena sesuai dengan jurusan S1-nya. Terpikir pula mengambil jurusan komunikasi atau jurnalistik yang sesuai dengan pekerjaannya di humas saat itu.

Namun, saat meminta izin kepada Rektor UMY kala itu, yakni Mohammad Dasron Hamid, semua opsi tersebut buyar. Alasan Dasron, UMY sudah memiliki banyak dosen untuk jurusan-jurusan yang diminati Novy tadi. "Kita itu yang tidak punya lulusan S-2 perpustakaan," kata Novy menirukan perkataan Dasron kepadanya.

Setelah menimbang berbagai hal, Novy pun akhirnya menerima "tantangan" rektor itu meski artinya dia harus memulai dari nol di dunia baru ini. "Saya terima itu dengan modal karena saya suka baca saja," ucapnya.

Beasiswa S-2 pun diraihinya pada 2012 di Jurusan Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah dua tahun menyelesaikan studi, Novy mulai bertugas sebagai pustakawan di UMY pada 2014 dengan jabatan koordinator repositori

dan jurnal.

Program pertama yang diinisiasinya adalah membuat warga kampus mengenali manfaat perpustakaan dan dekat dengan sumber literasi tersebut. Ini dilakukan melalui pelatihan literasi informasi bagi mahasiswa.

Bekal jejaring dan relasi dengan dosen selama di bagian humas dia memanfaatkan untuk mendatangkan mahasiswa guna mengikuti pelatihan tersebut. Materi pelatihan pun bersifat praktis untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas kuliah, skripsi, tesis, atau disertasi.

Salah satu materi yang dia ajarkan adalah cara mencari sumber informasi secara daring dengan benar. Ini mencakup pengenalan berbagai jurnal atau artikel ilmiah yang bisa diakses secara terbuka hingga cara merumuskan kata kunci (*keyword*) pencarian yang tepat dengan menggunakan Operator Boolean.

Mahasiswa sangat merasakan manfaat pelatihan itu. Sejumlah dosen yang mengikutinya juga mendapat pengetahuan baru terkait pencarian sumber pustaka tersebut.

Mandi bola

Mereka kemudian ikut merekomendasikan pelatihan itu kepada dosen dan mahasiswa lain sehingga pesertanya terus bertambah dari waktu ke waktu. "Dari awalnya 'jemput bola', sekarang kami 'mandi bola'," ujar Novy yang kemudian tersenyum.

Bahkan, sejak 2023, rektorat memasukkan pelatihan ini sebagai materi wajib dalam mata kuliah Metodologi Penelitian di UMY dengan pustakawan sebagai pengajarnya. Materi pun diperluas mencakup topik-topik lain yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan zaman.

Hal ini termasuk cara penggunaan

artificial intelligence (AI) alias akal imitasi secara etis dan efektif. Misalnya, memakai AI untuk membantu menyusun kerangka berpikir penelitian atau memberi rekomendasi daftar bahan bacaan terkait topik tertentu.

"Jadi, AI diperlakukan sebagai 'kail', bukan pemberi ikan. Dia menjadi teman diskusi mahasiswa atau dosen untuk meningkatkan pembelajaran," ucap Novy.

Tak berhenti di situ, Novy kembali menggelontorkan berbagai inovasi lain. Saat pandemi Covid-19 melanda, terobosan justru makin gencar dalam mengoptimalkan teknologi informasi di perpustakaan.

Selain menjadi solusi di tengah pembatasan aktivitas pada masa pandemi, penguatan ranah digital juga penting untuk menjawab kendala terbatasnya sumber daya manusia perpustakaan. Saat ini, UMY memiliki 13 pustakawan.

Namun, Novy menjelaskan, idealnya setiap pustakawan melayani maksimal 750 mahasiswa. Artinya, dengan jumlah 23.000 mahasiswa di UMY, kampus itu seharusnya memiliki 30 pustakawan. Penggunaan teknologi informasi membantu menutup ketimpangan tersebut.

Penguatan perpustakaan digital pun meningkatkan kenyamanan pengguna karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Apalagi, UMY telah mengadopsi konsep *library without wall* atau perpustakaan yang kehadirannya tak lagi dibatasi bangunan fisik.

Untuk itu, sejumlah portal dibuat, salah satunya MyPustaka yang berisi berbagai koleksi literasi yang dimiliki UMY. Koleksi ini mulai dari buku elektronik (*e-book*), buku cetak, jurnal ilmiah, hingga skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa UMY.



KOMPAS/PERGANATA INDRA RIATMOKO

Novy Diana Fauzie

Lahir: Magelang, November 1976

Pendidikan:

- D-3 Kearsipan UGM (1994)
- S-1 Bahasa Inggris STBA LIA Yogyakarta (2005)
- S-2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan UGM (2012)

Pekerjaan: Pustakawan, Kepala Perpustakaan UMY

Prestasi/penghargaan:

- Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional 2023
- Nomine ASEAN Young Librarian Award 2025

MyPustaka juga diintegrasikan dengan MyKlass, portal sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang dimiliki UMY. Ini memudahkan mahasiswa mengakses

bahan pustaka saat mengikuti kuliah daring.

Selain itu, ada pula portal Mbaca atau Muhammadiyah Membaca yang menyimpan ribuan koleksi *e-book* atau buku digital milik UMY. Berbeda dengan MyPustaka yang diperuntukkan bagi sivitas akademika, Mbaca dapat diakses masyarakat umum.

Ini dimaksudkan untuk mendukung program kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa UMY yang biasanya mengadakan kegiatan membangun perpustakaan atau pojok buku di daerah sasaran KKN. Tema-tema buku yang disediakan di portal ini pun bersifat umum, seperti cerita anak, panduan memasak, cara beternak, dan pengelolaan dana desa.

Perpustakaan UMY juga mie-

iliki portal SejarahMu atau singkatan dari Sejarah Muhammadiyah. Portal itu menyimpan arsip digital dan naskah-naskah kuno koleksi perpustakaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terbuka untuk diakses siapa pun.

Berkat berbagai inovasi itu, Novy terpilih sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional 2023. Ajang bergengsi tersebut diselenggarakan Perpustakaan Nasional.

Kini, Novy masih membidik berbagai inovasi lain untuk terus menghidupkan perpustakaan dan memperbesar manfaatnya seluas mungkin. "Saya juga berharap Perpustakaan UMY bisa lebih dikenal secara internasional lewat kolaborasi dan kerja sama dengan banyak pihak," katanya.

Buku dan Peradaban Bangsa

Willy Aditya

Ketua Komisi XIII DPR RI,
Pengusul RUU tentang Perbukuan

SALAH satu misi fundamental didirikannya negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Ialah mencerdaskan akal budi warga negara Republik Indonesia agar dalam kapasitasnya sebagai bangsa, ia mampu menunjukkan diri, mampu berperan aktif, dan mampu menjadi relevan dalam interaksi dan dialektika kehidupan warga dunia.

Agar hal itu terwujud maka proyek pembangunan nasional mestilah ber-
aras pada penguatan akal budi anak bangsa. Terkait dengan hal ini, kita tidak bisa menafikan peran penting dari keberadaan buku. Buku bukan sekadar bacaan atau media untuk dibaca. Buku juga bukan sekadar kumpulan kertas yang disusun hingga berhalaman banyaknya. Buku adalah wahana di mana pemikiran dituangkan, di mana gagasan diabdikan serta di mana rasa ditumpahkan. Buku adalah *storage* pemikiran dan gagasan bagi penulis sekaligus wahana di mana pembaca bisa mengaksesnya.

Buku adalah ruang di mana kegiatan membaca dan menulis berdialektika. Buku adalah manifestasi kebudayaan tertinggi manusia karena di sanalah aksara dan tanda berkumpul membangun gagasan. Buku laksana jembatan di antara makhluk pemikir bernama manusia berdiskursus.

MENCERAHKAN AKAL BUDI MANUSIA

Kita sering lupa, Indonesia merdeka bukanlah hadiah. Ia diperjuangkan oleh berbagai pemikiran besar yang lahir dari rahim literasi berupa buku. Ia lahir dari spirit zaman yang haus akan pengetahuan. Terkait hal tersebut, kita punya sejarah emas berupa Balai Pustaka yang pada masanya menjadi pusat peradaban; yang tidak pernah mengategorikan dan memisah-misahkan antara buku umum dan buku sekolah. Karena, bagi para pendiri bangsa, pengetahuan adalah satu kesatuan utuh untuk mencerahkan akal budi manusia.

Kita harus menghadapi sebuah realitas yang getir di mana data menunjukkan bahwa skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) kita secara konsisten menempatkan kita di papan bawah dunia. PISA adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam bidang literasi membaca, matematika, dan sains. Ini bukan sekadar angka statistik yang bisa kita abaikan atau maklumi begitu saja. Ini adalah alarm darurat bagi masa depan bangsa. Ini pertanda kita sedang berisiko melahirkan generasi yang tidak siap bersaing dan sekadar menjadi generasi konsumen.

Di sisi lain, kita bisa melihat paradoks digital kita. Indeks literasi digital menunjukkan bahwa kita sangat cakap menggunakan gawai, tetapi pada saat yang sama kita menjadi salah satu konsumen hoaks terbesar di dunia. Saya sering melihat, dan ini menyedihkan, orang-orang terpelajar, bahkan profesor sekalipun, banyak yang termakan hoaks. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita hanya bisa membaca, tapi tidak terlatih untuk berpikir kritis.

Literasi kita berhenti pada kemampuan mengeja kalimat, belum sampai pada kemampuan mencerna, menimbang, dan mendialektikakan gagasan. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa berada dalam kultur berdia-

log,
berdis-
kursus,
hingga ber-
dialektika yang
kuat.

Realitas lain menyam-
paikan pada kita tentang
toko-toko buku, yang dulu
menjadi surga pengetahuan, se-
karang tutup satu per satu. Orang
sudah tidak mau lagi membaca. Di
Jogja, kota yang dulu dikenal sebagai
surganya buku, denyutnya sudah
tidak seperti dulu. Dulu ada Gama-
pres, tempat pertama yang saya
kunjungi saat masuk Jogja. Seka-
rang tempat itu sudah tutup. *Social
agency* seperti Togamas, satu per
satu meredup atau bahkan lenyap.
Ini adalah alarm bagi kematian in-
frastruktur pengetahuan kita secara
perlahan.

Yang paling membuat hati lebih
miris lagi ialah ketika saya pulang
ke Sumatra Barat. Di Pasar Ateh,
Kota Padang, kota yang banyak
melahirkan peradaban adiluhung,
yang melahirkan Buya HAMKA
dan begitu banyak pemikir besar
bangsa, saya melihat dengan mata
kepala sendiri buku-buku dijajarkan
dengan kandang hewan dan salon
plus-plus.

Can you can imagine it?! Begitu
ternyata cara kita menempatkan
keberadaan buku hari ini?! Di ma-
sanya, Buya HAMKA adalah seorang
penulis produktif, dan di zamannya
telah berdiri delapan penerbit buku:
sebuah indikator yang menunjukkan
betapa semaraknya dunia perbukuan
kala itu.

Belum lagi jika kita mengingat
Hatta, Yamin, Syahrir, Tan Malaka, dll,
betapa mengharu pilu kita melihat
kenyataan di atas. Semua ini men-
jadi kenyataan yang banal sekaligus
cermin paling telanjang tentang ba-
gaimana begitu abai dan rendahnya
kita menempatkan pengetahuan da-
lam kehidupan kita sebagai makhluk
berakal.

Semua kenyataan itu seolah ter-
konfirmasi dengan data yang mes-
tinya membuat kita tidak bisa tidur
nyenyak: IQ rata-rata bangsa kita
telah turun secara gradual. Di zaman
Pak Harto, angkanya ada di kisaran
83, 82. Hari ini, angkanya berada di

kisaran 78. Turun! Dan ini adalah sinyal dari kemunduran sebuah peradaban.

Di sisi lain, buku telah menjadi barang mewah bagi kita. Di negara seperti Jerman, seorang pekerja hanya butuh menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk membeli buku. Di sini? Seorang pekerja di Jakarta harus merelakan porsi upah minimumnya yang cukup besar untuk memiliki sebuah buku.

Dari India, saya pernah membawa pulang tiga koper besar buku. Mengapa bisa demikian? Karena harga buku di sana luar biasa murah! Ada yang cuma lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah; dengan kualitas buku seharga ratusan ribu rupiah di sini.

Dari mana semua kekacauan ini bermula? Salah satu akar masalahnya, dalam hemat saya pribadi, ialah cara pandang kita yang terjebak dalam penyempitan antara buku sekolah dan buku umum. Undang-undang yang saat ini ada, terlalu berat pada intervensi buku teks. Saya paham alasan bahwa ini merupakan upaya sinkronisasi antara UU Sisdiknas dan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya ternyata cukup fatal. Apa yang disebut buku umum dianggap sebagai urusan privat, urusan bisnis, untuk kemudian diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar kita yang rapuh. Akibatnya pengetahuan menjadi terasa begitu mahal dan tak berakses.

Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah kekeliruan fundamental. Mengapa yang namanya pengetahuan mesti dipisahkan? Seolah-olah pengetahuan di luar sekolah itu tidak penting. Seolah-olah membangun imajinasi lewat novel, membuka wawasan lewat buku filsafat, atau belajar *skill* baru dari buku nonfiksi itu bukan bagian dari 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Tembok pemisah inilah yang telah memenjarakan potensi intelektual bangsa kita selama ini.

EMPAT PILAR

Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kenyataan ini? Jawabannya bukan membuat regulasi yang lebih ketat. Jawabannya juga bukan kontrol yang lebih rumit. Jawabannya ialah membangun sebuah ekosistem yang hidup, yang berdenyut, yang kolaboratif, dan yang memiliki spirit membebaskan atas kehidupan buku di Tanah Air.

Setidaknya ada empat pilar untuk kita memulainya. Pilar pertama ialah soal konten dan akses global. Kita harus

punya proyek peradaban yang berani. Kita harus menghidupkan kembali Balai

Pustaka, bukan sebagai museum yang kita kenang, tapi kita restorasi fungsinya menjadi pusat penerjemahan dan literasi modern yang relevan. Kita bisa belajar dari India yang mampu mengundang penerbit dunia untuk mencetak edisi murah dengan kualitas kertas terjangkau agar rakyat bisa membeli.

Pilar kedua ialah kolaborasi dan keterlibatan publik. Negara tidak bisa, dan tidak boleh, bekerja sendiri. Kita harus mengundang semua kekuatan bangsa; ya pemikirnya, ya penggerak literasinya, ya penerbitnya, ya para *influencer*, ya para pengusahnya; untuk bersama-sama merumuskan bangunan ekosistem yang suportif terhadap kerja peradaban ini. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Ini strategi agar semua merasa menjadi bagian dari gerakan ini, *part of the movement*.

Pilar ketiga ialah kebijakan yang membebaskan. RUU Perbukuan yang tengah berproses ini berprinsip *open source* dan antimonopoli. Biarkan gagasan lahir dari mana saja. Jangan lagi negara sibuk untuk mengatur hal-hal sifatnya privat seperti royalti. Biarkan itu menjadi urusan bisnis di mana negara hanya memfasilitasi agar keadilan bisa dirasakan oleh segenap *stakeholder*. Fokus negara ialah sebagai fasilitator. Prinsipnya harus sederhana: hidupi mereka semua yang mau menulis, mencetak, menerbitkan buku. Dan, yang terpenting, hapuskan pajak untuk semua buku! Hal semacam ini seharusnya tidak ada di negara yang amanat konstitusinya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun pilar keempat ialah ruang dan gerakan. Literasi itu butuh ruang. Kita harus mendorong lahirnya ruang-ruang literasi di berbagai daerah. Konsepnya sederhana saja, tapi efektif. Saya pribadi sudah memulainya. Saya mendirikan ruang literasi di Jogja. Di sana ada perpustakaan umum, ada perpustakaan anak, ada pula aktivitas dan komunitas yang menyelenggarakan kegiatan intelektual, mulai dari soal-soal vokasi sampai urusan kebangsaan.

Ini semua karena kita butuh lebih banyak tempat untuk '*cangkruk*', untuk diskusi santai tapi berisi, untuk berkarya, dst, karena dari situlah tradisi literasi yang utuh akan tumbuh secara organik. Secara pribadi, zakat saya itu berupa buku dan kegiatan-kegiatan literasi bagi sebanyak-banyaknya pihak.

PANGGILAN SEJARAH

Dengan latar pemikiran seperti itulah revisi terhadap UU Sistem Perbukuan digulirkan. Gagasan ini bukan sekadar proyek legislasi teknis. Ini juga bukan sekadar proyek rutin DPR. Di tengah disrupsi dan perkembangan zaman yang semakin cepat berubah, niatan ini menjadi ikhtiar bagi upaya agar negara tetap menjaga misi sucinya.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali. Apa yang kita bicarakan hari ini bukan proyek legislasi biasa. Ini adalah sebuah panggilan sejarah, sebuah warisan yang akan kita tinggalkan bagi anak-cucu kita. Politik akan menjadi mulia ketika ia bisa melahirkan kebijakan yang dinikmati ratusan juta orang. Jika RUU ini berhasil kita lahirkan dengan spirit yang progresif, semoga ini akan menjadi amal jariah kita semua.

Bentuk Literasi Visual lewat Read Aloud

Pengantar:

Dengan pemikiran dan inovasi, ITB tidak hanya telah mendunia, tetapi juga kuat berakar mengabdikan diri pada Nusantara. Berikut kerja sama LPPM ITB dan Media Indonesia, sejak 20 April 2021, menghadirkan tulisan inovasi, riset, hingga pelatihan yang telah dijalankan sivitas akademik ITB di berbagai pelosok Tanah Air.

- Metode membaca lantang terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca, memahami narasi, sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku.
- Pada 17 Juli 2025, tim FSRD ITB melaksanakan kegiatan yang menggunakan metode *read aloud* di SDN Sukamaju, Purwakarta.
- Murid-murid menjadi lebih berani berekspresi dan rasa ingin tahu mereka terhadap buku cerita makin besar.

ELSA SILVIA NUR AULIA DKK
Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

TIM PENULIS



Dr Elsa Silvia Nur Aulia MPd



Dr Riama Maslan Sihombing MSn



Dr Tri Sulistyaningtyas MHum



Dr Epin Saepudin MPd

ANAK-ANAK masa kini tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi elemen visual, dari buku bergambar, ilustrasi, hingga media digital interaktif. Dalam konteks itu, kemampuan untuk memahami dan menyampaikan informasi secara visual menjadi keterampilan penting yang perlu dikembangkan sejak dini.

Salah satu pendekatan efektif dalam menumbuhkan literasi visual anak ialah melalui buku bergambar. Buku jenis itu membantu mengasah imajinasi, memperkuat pemahaman cerita, dan mendorong kemampuan berpikir kritis.

Metode *read aloud* (membacakan buku bergambar dengan lantang) terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca, memahami narasi, sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku. Melalui metode itu, anak tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga aktif mengamati ilustrasi, menafsirkan makna, dan berdiskusi tentang isi buku. Proses itu secara langsung mendukung perkembangan literasi visual mereka.

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnik dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Di tengah arus budaya populer dari luar, memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak-anak menjadi semakin penting.

Buku bergambar bertema budaya Nusantara bisa menjadi jembatan yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan itu secara menyenangkan dan mudah dicerna. Melalui *read aloud*, anak-anak diajak memahami perbedaan dan persamaan budaya di Indonesia, serta menumbuhkan sikap inklusif, toleran, dan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka sendiri.

Namun, peran *read aloud* dalam memperkuat literasi visual dan membangun kesadaran budaya anak-anak masih jarang mendapat perhatian serius. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek linguistik, seperti peningkatan kosakata, tanpa banyak menggali potensi metode itu dalam membentuk pemahaman visual dan kultural anak.

Dalam menanggapi hal ini, tim pengabdian masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB menyelenggarakan kegiatan Berpetualang dalam Literasi Visual di SDN Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pada 17 Juli 2025.

Kegiatan yang diketuai Dr Elsa Silvia Nur Aulia MPd itu bertujuan memperkenalkan *read aloud* sebagai metode pembelajaran yang tidak hanya memperkuat literasi visual, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada siswa sekolah dasar.

KESERUAN DI SEKOLAH

Suasana di SDN Sukamaju, Purwakarta, semarak dengan dimulainya kegiatan *read*

aloud yang diinisiasi tim FSRD ITB. Acara dibuka Dr Epin Saepudin MPd bersama Kepala SDN Sukamaju. Dalam sambutannya, Kepala SDN Sukamaju menekankan pentingnya membaca sebagai kunci kesuksesan.

"Kami berharap, program semacam ini dapat terus berlanjut guna memperkaya pengetahuan anak-anak kami di sini," ujarnya.

Selanjutnya, Dr Riama Maslan Sihombing MSn membacakan cerita rakyat Sulawesi berjudul *Anjing, Kucing, dan Tikus*. Murid-murid menyimak dengan tenang, menunjukkan rasa ingin tahu. Keingintahuan mereka berlanjut ke sesi menggambar dan menceritakan kembali kisah yang baru saja didengar.

Sesi itu dipandu mahasiswa, yaitu Kiki, Abidzar, Bintang, dan Riyadi. Hasil gambarnya beragam, dari rumah nenek hingga hewan peliharaan. Kemudian mereka juga menceritakan kembali cerita yang dipahami di atas kertas.

Keseruan berlanjut di luar kelas. Anak-anak kelas III diajak bermain berbagai permainan, seperti estafet makan, menyelesaikan *puzzle*, dan menyusun menara gelas. Kegiatan yang penuh kegembiraan itu diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba menggambar dan bercerita terfavorit, serta juara permainan luar ruangan, yang disampaikan Dr Elsa Silvia Nur Aulia MPd. Hari itu menjadi pengalaman berkesan bagi seluruh siswa SDN Sukamaju.

KOMITMEN PARA GURU

“Kami, para guru di SDN Sukamaju, sangat antusias dan berterima kasih atas inisiatif tim FSRD ITB melalui program Bertualang dalam Literasi Visual ini,” ujar salah satu guru kelas III di SDN Sukamaju.

Kegiatan *read aloud* yang dipadukan dengan aktivitas menggambar dan bercerita kembali, apalagi ditambah permainan di luar ruangan, dinilai benar-benar berhasil membangkitkan semangat belajar anak-anak. Murid-murid menjadi lebih berani berekspresi dan rasa ingin tahu mereka terhadap buku cerita makin besar.

Para guru pun mengakui bahwa literasi visual di kalangan anak merupakan hal yang tidak bisa ditawar pada era ini. Mereka melihat bahwa anak-anak butuh dibekali kemampuan lebih daripada sekadar membaca teks.

“Mereka harus bisa memahami gambar dan pesan di baliknya. Program ini sangat relevan dengan kebutuhan itu. Semoga kolaborasi baik ini bisa terus berlanjut, kami siap mendukung penuh agar anak-anak di SDN Sukamaju terus mendapatkan *insight* baru dan semakin mencintai budaya kita lewat buku-buku bergambar yang menarik,”



Keberlanjutan Program

PROGRAM Bertualang dalam Literasi Visual di SDN Sukamaju, Purwakarta, ialah langkah awal dari komitmen jangka panjang tim pengabdian masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB. Tim percaya bahwa dampaknya perlu terus terasa dan berkembang.

Oleh karena itu, ada beberapa rencana kunci yang tim siapkan untuk memastikan program itu bisa terus memberi manfaat bagi anak-anak di sana. Pada langkah per-

tama, tim berencana fokus pada pengembangan modul praktis untuk literasi visual dan *read aloud*. Tujuannya guru dan orang tua bisa terus mengaplikasikan metode itu secara mandiri, lewat panduan berisi teori dan beragam aktivitas interaktif yang sudah terbukti seru.

Penguatan guru dan komunitas lokal juga jadi prioritas. Tim akan mengadakan lokakarya lanjutan untuk melatih guru-guru SDN Sukamaju secara lebih mendalam tentang

teknik *read aloud* yang efektif, pemilihan buku bergambar bernuansa budaya lokal, dan strategi memupuk pemahaman visual anak. Dukungan dari Kepala SDN Sukamaju dan para guru saat itu sangat meyakinkan tim ITB bahwa semangat itu akan terus hidup.

Keterlibatan mahasiswa akan terus didorong. Mahasiswa yang sedang tugas akhir atau KKN nantinya dapat diarahkan ke SDN Sukamaju. Mereka bisa membawa ide-ide segar, koleksi buku baru, serta membantu murid-murid mendapatkan wawasan lebih dalam tentang cerita dan budaya, sekaligus menjadi pendamping bagi guru dalam menerapkan modul yang ada. Itu ialah transfer pengetahuan dua arah yang saling menguntungkan.

Terakhir, tim berencana memperkaya koleksi buku bergambar bertema Nusantara di sekolah. Dengan menjajaki donasi atau kolaborasi dengan penerbit, tim berharap anak-anak punya lebih banyak pilihan cerita untuk dijelajahi sehingga pemahaman dan kecintaan mereka pada budaya Indonesia makin mendalam.

Harapannya, program itu bukan sekadar kegiatan sesaat, melainkan sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya membangun literasi visual dan pelestarian budaya di SDN Sukamaju. (Tim FSRD ITB/ M-1)

Literasi Digital Bekal Bersikap Kritis

Literasi digital yang baik dibutuhkan agar orang mampu berpikir kritis dalam mengelola informasi yang melimpah di era digital saat ini.

JAKARTA, KOMPAS — Saat ini, literasi bukan hanya dasar keterampilan dalam transisi digital yang inklusif. Literasi juga dibutuhkan untuk mengakses dan memilah informasi serta pengetahuan yang berbetbaran di jagat maya.

Dalam peringatan Hari Literasi Internasional 2025 yang jatuh pada Senin (8/9/2025), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menyerukan agar setiap warga dibekali dengan keterampilan literasi untuk mendapatkan manfaat digitalisasi. Sayangnya, masih banyak warga dunia yang belum memiliki keterampilan literasi dan numerasi dasar.

Hari Literasi tahun ini mengambil tema "Promoting Literacy in the Digital Era".

Saat ini, hampir tujuh dari sepuluh orang di dunia (68 persen) menggunakan internet dan empat dari lima orang berusia 10 tahun ke atas memiliki telepon seluler. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) juga telah diadopsi dengan cepat di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Namun, empat dari sepuluh anak gagal mencapai kemahiran minimum dalam membaca, sementara 272 juta anak dan remaja putus sekolah pada 2023.

"Selain membaca dan menulis di atas kertas, literasi di era digital memungkinkan orang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan konten digital secara aman dan tepat. Literasi juga berperan penting dalam menumbuhkan pemikiran kritis, memilah informasi yang kredibel, dan menavigasi lingkungan informasi yang kompleks," tutur Borhene Chakro-un, Direktur Division of Policies and Lifelong Learning Systems Education Sector UNESCO.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, penguatan literasi anak-anak Indonesia dilakukan dengan memperkaya sumber bacaan yang menarik dan bermutu bagi mereka. Cerita yang mampu memantik rasa ingin tahu anak dapat digali dari banyak daerah serta dikemas dalam bentuk cerita berbasis sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM).

Bacaan bermutu

Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan, Badan Bahasa berupaya memperluas akses terhadap bacaan bermutu untuk anak yang relevan dengan kebutuhan zaman. Ribuan

buku cerita anak dibagikan untuk membangun budaya baca sejak dini, meningkatkan keterampilan literasi, serta mempersiapkan generasi Indonesia yang cerdas, kritis, dan berdaya saing global.

Masyarakat juga dapat mengakses koleksi terjemahan melalui laman penerjemahan.kemdikdasmen.go.id. Badan Bahasa juga memfasilitasi lebih dari 780 buku digital, buku audio, dan buku video yang dapat diakses melalui laman budi.kemdikdasmen.go.id.

Penguatan literasi kian penting. Sebab, individu yang melek huruf cenderung lebih diuntungkan dari digitalisasi. Keterampilan literasi yang rendah dapat membatasi seseorang dalam memperoleh keterampilan digital. Tingkat literasi seseorang dapat memengaruhi cara dia mendapatkan manfaat dari transisi digital dan peluang kerja baru serta mengatasi maraknya misinformasi, disinformasi, dan "ruang gema".

Di negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), hanya 9 persen remaja berusia 15 tahun yang dapat membedakan antara fakta dan opini dalam teks digital. Itu sebabnya, literasi sangat penting saat memanfaatkan teknologi digital,

seperti AI generatif.

Sedikitnya remaja yang memiliki tingkat literasi digital memadai juga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Indonesia. Sebab, data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan, pada 2025 tercatat lebih dari 365 juta perangkat gawai yang aktif di Indonesia. Pengguna media sosial mencapai 143 juta orang dan pengguna internet menyentuh 212 juta orang atau 74,6 persen dari populasi.

Kemajuan digital juga menghadirkan tantangan. Selama Oktober 2024 hingga Maret 2025, lebih dari 1,3 juta konten negatif beredar di media sosial, termasuk 233.000 konten pornografi dan 5,7 juta konten judi daring. Sebanyak 48 persen perempuan Indonesia pernah mengalami penipuan digital dan 1.791 kasus kekerasan berbasis gender daring dilaporkan sepanjang 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Program Literasi Digital Nasional memperkuat empat pilar literasi digital, yakni etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Indeks Literasi Digital Indonesia pun menunjukkan peningkatan, dengan skor nasional 3,78 dari skala 5 pada 2024. (ELN)

Fokus ke Kebutuhan Sekolah yang Nyata

- Sekolah di wilayah 3T tidak memiliki sarana dasar seperti listrik untuk menggunakan layar digital.
- Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru merupakan salah satu masalah fundamental pendidikan.
- Distribusi layar pintar dijalankan tanpa mengabaikan pembangunan sekolah dan peningkatan kesejahteraan bagi para guru.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PEMERTINTAH berencana membagikan layar digital pintar atau *smart digital screen* untuk 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ini. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mengatakan hal itu tidak dapat dipukul rata untuk semua sekolah. “Dari sekian banyak sekolah di Indonesia, ada memang sekolah yang memerlukan layar digital pintar. Tapi kalau memukul rata semua sekolah memerlukannya, saya kira ini keliru,” ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin. Lebih lanjut, menurut Rissalwan, beberapa sekolah yang berada di wilayah 3T tidak memiliki sarana dasar seperti listrik untuk menggunakan fasilitas tersebut.

“Karena, coba bayangkan, saya tidak tahu apakah pemerintah pernah mendatangi 330 ribu sekolah itu semua atau hanya melihat angka di atas kertas saja, misalnya ada sekolah yang jangankan listrik, tempat duduk saja bahkan tidak ada. Beberapa sekolah di daerah terpencil di Papua, Sulawesi, dan bahkan Jawa saja masih ada sekolah yang seperti itu,” tegas Rissalwan.

PENGATEGORIAN SEKOLAH

Menurutnya, gagasan ini sebetulnya merupakan hal yang baik, hanya tidak memperhitungkan mengenai kondisi nyata di berbagai sekolah yang ada di Indonesia.

“Jadi bagaimana mungkin dia mau pakai layar digital pintar ini, listriknya saja tidak ada. Jadi miris sekali, ya. Gagasan ini sebetulnya bagus, tapi seperti tidak memperhitungkan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Alih-alih menjadi program yang bermanfaat di sekolah, Rissalwan juga melihat ada kecenderungan mengulangi penyimpangan yang ada saat pengadaan Chromebook di pe-

merintah sebelumnya.

“Pengadaan ini rentan sekali. Jadi lebih baik fokus pada pengadaan kebutuhan sekolah yang memang nyata. Sekolah memang jumlahnya ada ribuan, tapi kebutuhannya berbeda. Coba dibuat kategori, ada sekolah yang siap digitalisasi, tapi ada juga sekolah yang membutuhkan literasi dasar,” ujar Rissalwan.

KOMPETENSI GURU

Menurut Koordinator Nasional Perpustakaan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, persoalan fundamental pendidikan di Indonesia sebetulnya bukan hanya pada sisi sarana dan prasarana yang memang masih belum memadai.

“Tapi lebih dari itu ialah terkait dengan kompetensi guru. Nah kompetensi guru kita ini memang masih di bawah rata-rata, dan kompetensi guru yang relatif di bawah itu tentu berdampak pada rendahnya kualitas proses pembelajaran,” ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Lebih jauh, rendahnya kompetensi guru di Indonesia juga berkorelasi dengan kesejahteraan guru, khususnya para guru non-ASN yang masih rendah.

“Mestinya Pak Prabowo fokus juga untuk meningkatkan kompetensi guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Karena pengadaan *smart TV* ke seluruh sekolah itu tidak akan berdampak apa-apa jika gurugurunya dari segi kualitas atau kompetensi itu masih di bawah. Tidak akan berdampak juga kalau guru-gurunya itu belum sejahtera,” jelas Satriwan.

DISERTAI REVITALISASI SEKOLAH

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmien), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menjelaskan program ini dibuat tanpa mengabaikan pembangunan sekolah dan peningkatan kesejahteraan bagi para guru.

“Program ini bukan berarti mengabaikan pembangunan sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru. Pembangunan infrastruktur fisik sekolah tetap berjalan, begitu pula komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru,” ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Lebih lanjut, menurutnya, digitalisasi melalui *interactive flat panel* (IFP) justru hadir sebagai pelengkap untuk memperkuat kualitas pembelajaran di dalam kelas.

“Perlu kami sampaikan kembali bahwa program digitalisasi pembelajaran dilaksanakan bersamaan dengan program revitalisasi dan pembangunan sekolah yang dituangkan dalam instruksi presiden yang sama,” tegas Gogot. (H-2)

Berlari dan Menjaga Asa Membaca

Berlari sambil merawat perpustakaan menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari Eko Cahyono (45). Melalui Perpustakaan Anak Bangsa yang ia dirikan 28 tahun lalu di Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sehari-hari Eko merawat asa orang-orang untuk membaca.

Defri Werdiono

Pekan lalu, Eko baru saja mengikuti Journey 100, sebuah ajang ultramaraton mengelilingi Gunung Kawi yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang, Blitar, dan Kota Batu. Lokasi start dan finis di Batu dengan jalur lari menyusuri sejumlah titik di Batu, Malang, dan Blitar.

"Berangkat pukul 05.00, saya menyelesaikan lari dengan waktu tempuh 23,5 jam dari total *cut-off time* 26 jam," kata Eko saat ditemui di Perpustakaan Anak Bangsa di Sukopuro, Malang, Senin (15/9/2025).

Menurut Eko, ada sekitar 40 peserta Journey 100. Sebanyak 22 orang ikut kategori penuh 115 kilometer (km), sisanya ikut kategori 60 km. Beberapa peserta tak sampai garis finis lantaran cedera. Maklum, medan pegunungan dengan elevasi naik-turun ditambah cuaca panas.

Journey 100 baru kali ini diadakan. Tujuan utamanya pengumpulan donasi guna membantu rehabilitasi panti asuhan di Kota Batu. Panitia dan pengagasnya ialah Komunitas Berandal Lokajaya, salah satu komunitas lari di Malang.

"Pengagasnya teman satu komunitas. Mereka punya ide lari mengitari (Gunung) Kawi dengan tujuan mengumpulkan donasi. Target paling tidak Rp 25 juta, tetapi sudah dapat Rp 20 juta dan pengumpulan donasi masih berlangsung sampai satu bulan ke depan," ucap Eko.

Bagi Eko, ini kali pertama dirinya mengikuti ajang lari jarak jauh tahun 2025. Namun, sebagai panitia, kru, dan *race director* lari, ini kali ke-26 yang dilakukannya sepanjang Januari-September 2025.

"Dari 26 *event* itu, yang berbau donasi baru kali ini. Sebelumnya, saya beberapa kali ikut lari dalam rangka amal, seperti Run for Charity Blitar dua kali, yakni 2022 sejauh 35 km dan 2023 sejauh 50 km,"

ujar Eko.

Ia menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) atas rekor lari estafet melewati destinasi wisata dengan jarak terjauh 1.260 km selama 20 hari dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-1.260 Kabupaten Malang pada 2020. Total ada 60 pelari saat itu.

Eko mengaku senang berlari karena sehat. Lari bisa dilakukan di mana pun, simpel, dan mudah. Sambil berlari juga bisa mengumpulkan donasi yang hasilnya terkadang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kepedulian para pelari ini bisa membantu pembangunan panti asuhan, rumah singgah, hingga tempat ibadah.

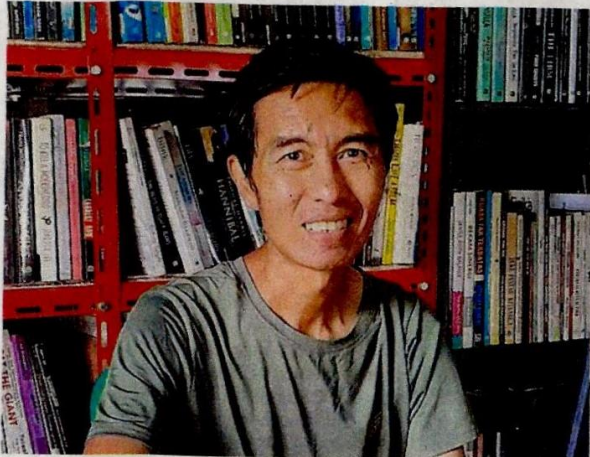
"Kita yang berlari, kemudian masyarakat berdonasi. Selain (menjadi) peserta, untuk *event charity*, kadang saya bantu-bantu cari sponsor, *support-support* beberapa yang dibutuhkan," katanya.

Eko mulai ikut ajang lari pertama pada 2001 dan benar-benar fokus ikut lari maraton skala besar pada 2014, seperti Bromo Marathon dan Borobudur Marathon. Dia pun telah menyelesaikan 50 kali maraton penuh. Salah satu yang berkesan bagi Eko saat ia meraih podium 1 Pinepark Local Legend, Batu, tahun 2023. Saat itu, ia mesti berlari sembilan hari bersaing dengan banyak pelari *road* dan *trail*.

Mengurus perpustakaan

Sambil berlari, Eko mengaku tetap fokus mengurus perpustakaan yang telah menjadi "roh" hidupnya. Kian hari koleksi buku di perpustakaan miliknya juga terus bertambah. Saat ini ada sekitar 110.000 eksemplar buku yang memenuhi rak-rak perpustakaannya. Sebagian dari buku-buku itu masih di tangan pembaca.

"Tiga hari kemarin datang donasi buku dari Yogyakarta. Saya dikirim hampir 30



KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Eko Cahyono

Lahir: Malang, Maret 1980

Pendidikan:

- SDN Sukopuro 1, Malang
- SMPN 1 Tumpang, Malang
- SMAN Tumpang, Malang

Penghargaan, antara lain

- Kick Andy Heroes 2010
- Satu Indonesia Awards 2012
- Mutiara Bangsa 2012
- Nugra Jasadharma Pustaloka 2010

eksemplar. Kalau buku-buku sampai hari ini masih terus mengalir karena pengunjung dan peminjam tetap ada. Anak Bangsa juga masih membutuhkan bantuan buku bacaan. Semua jenis bacaan kami terima," kata Eko.

Salah satu donatur yang setia mengirimkan buku ke Perpustakaan Anak Bangsa adalah Indri Puspitasari dari Bandung. Setiap bulan dia mengirimkan 2-5 eksemplar buku. Hal ini telah dilakukannya selama 10 tahun terakhir. Juga ada donatur lain dari sejumlah daerah yang mengirim buku pada Eko.

Tak bisa dimungkiri, era telah berubah. Hadirnya teknologi digital tak bisa dihindari, termasuk munculnya buku elektronik (*e-book*). Seiring itu pula, sebagian orang beranggapan, buku fisik bakal semakin ditinggalkan. Orang akan lebih mudah mencari sumber bacaan di internet dibanding beli buku.

Namun, Eko yakin, mereka yang sudah terbiasa membaca buku secara langsung tidak akan terpengaruh oleh perubahan zaman. Mereka tetap akan mencari buku fisik. Ini

yang terjadi di Perpustakaan Anak Bangsa, tidak banyak pembaca melirik *e-book*.

"Di laptop saya banyak *e-book*, tetapi teman-teman tidak mau. Ketika salah satu judul buku saya sedang dipinjam, ada pembaca lain menginginkan buku judul yang sama. Mereka saya tawari judul yang sama di *e-book*, tetapi mereka enggan. Mereka lebih memilih menunggu buku fisiknya kembali," tutur Eko.

Perpustakaan Anak Bangsa buka setiap hari selama 24 jam dengan anggota terdaftar sekitar 800 orang. Mereka tidak hanya berasal dari Malang, tetapi juga daerah lain, seperti Kediri, Pasuruan, dan Blitar. Namun, banyak pembaca di perpustakaan itu tidak terdaftar. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 2.000 orang.

"Saya tidak menerapkan aturan kaku di perpustakaan. Di sini siapa datang, ambil buku, bawa pulang, ya, *udah*. Bahkan, ada buku yang dipinjam dan baru kembali setelah berbulan-bulan. Ada teman S-2 pinjam dan baru dikembalikan setelah wisuda," kata Eko.

Tak sedikit pula pembaca yang kemudian tertarik membuat perpustakaan di tempat tinggal mereka. Kepada mereka, Eko akan meminjamkan 300-500 buku sebagai "modal awal" mendirikan perpustakaan. Jika perpustakaan mereka sudah berjalan, Eko akan menambahkan buku lagi, bulan berikutnya, atau merotasinya dengan buku baru.

Animo pembaca membuat perpustakaan paling ramai pada 2014-2015. Saat itu jumlahnya mencapai 120 perpustakaan. Seiring berjalannya waktu, kesibukan, dan kondisi tertentu, saat ini jumlahnya tinggal 30-40 perpustakaan.

Mukjizat buku

Eko, penerima penghargaan Satu Indonesia Awards 2012, mengaku konsisten menggeluti dunia perpustakaan karena banyak pelajaran hidup didapat. "Banyak pertanyaan terlontar, kok, betah *ngurus* perpustakaan? Padahal, secara materi tidak dapat, malah keluar duit? Intinya, saya punya banyak peristiwa menarik, unik, dan mukjizat dari buku," kata penerima Anugerah Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Nasional 2017 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Eko menceritakan, salah satu yang berkesan, pengalaman saat dirinya punya teman buta

huruf dan tidak sekolah lantaran alergi kertas. Setiap pegang kertas, sang kawan ini selalu bersin-bersin. Namun, kawan itu suka main gitar. Sejak itu, disediakan gitar di Perpustakaan Anak Bangsa. Sang kawan pun kerap main ke perpustakaan hanya sekadar untuk main gitar di halaman.

Tahu ada buku berisi notasi lagu, Eko menunjukkan buku itu kepada sang kawan. Awalnya, sang kawan menolak. Namun, lambat laun dia menerima. Sang kawan pun belajar dari buku itu sambil memetik gitar. Tanpa disadari, alerginya lama-kelamaan hilang.

Eko juga menunjukkan majalah dengan gambar-gambar menarik kepada sang kawan yang buta huruf itu. Kawannya merespons dan tertarik belajar membaca. Eko memasukkan sang kawan ikut paket C dan jenjang berikutnya sampai kuliah dan lulus. Sekarang sang kawan telah menjadi guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah di Jawa Timur.

"Untuk hal seperti ini butuh waktu sampai enam tahun. Saya harus mendampingi dia, mencari kejar paket A di mana? Bisa kuliah di mana? Dosen yang bisa kasih keringanan di mana? *Nyari* info soal lowongan guru di mana? Sekarang dia jadi guru," kata Eko, anak ketiga dari tiga bersaudara itu.

Kini, segudang penghargaan menghampiri Eko. Rentetan piagam penghargaan, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, menghiasi salah satu dinding perpustakaan, bersanding dengan 700-an keping medali hasilnya berlari.

Pada 2017 Eko diundang ke Istana Negara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Saat itu Presiden Joko Widodo mengundang 20 orang yang konsisten di bidang pendidikan, termasuk dirinya.

Mata Ujian Pilihan TKA Tentukan Jurusan Kuliah

Peran orangtua dan guru krusial dalam menentukan mata ujian TKA yang dipilih murid agar sesuai dengan minat, bakat, dan prospek jurusan kuliah.

JAKARTA, KOMPAS— Para murid yang akan mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA diminta cermat dalam memilih dua mata pelajaran pilihan yang diujikan selain tiga mata pelajaran wajib: Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Pemilihan yang tepat sangat penting agar sesuai dengan jurusan kuliah yang ingin dituju di perguruan tinggi.

Direktur SMA di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Winner Jihad Akbar mengatakan, TKA bukan hanya ujian, melainkan juga sarana pembelajaran dan pengalaman berharga dalam meniti masa depan. Para murid harus mempersiapkan diri dengan baik.

"TKA bukan hanya bentuk kesiapan menghadapi seleksi (ke perguruan tinggi), melainkan juga kesempatan bagi siswa untuk membuktikan konsistensi prestasi dan mempertahankan pilihan program studinya," kata Winner, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).

Mulai tahun ini sertifikat TKA akan menjadi salah satu syarat bagi murid yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) atau jalur prestasi. TKA digunakan oleh perguruan tinggi dan menjadi instrumen validasi rapor dalam proses SNBP.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Asesmen Pendidikan di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menjelaskan, kesalahan dalam menentukan mata ujian dapat berdampak pada ketidakefektifan dengan program studi yang diinginkan. Akibatnya, murid berisiko mengalami kendala saat seleksi masuk

perguruan tinggi atau bahkan salah jurusan ketika sudah menempuh pendidikan tinggi.

Akan jauh lebih ringan apabila jurusan yang dipilih di perguruan tinggi adalah yang sudah pernah dipelajari ketika masih duduk di bangku SMA.

Fondasi keilmuan

Menurut Rahmawati, seseorang yang ingin berhasil menyelesaikan suatu program studi di perguruan tinggi lalu menjadi seorang spesialis di bidang tertentu, maka dia memerlukan fondasi keilmuan yang kuat dan spesifik. Hal ini harus ditentukan sedini mungkin.

Dia mencontohkan, murid bisa mulai mengenali minat dan bakat dirinya sendiri, lalu dicocokkan dengan mata pelajaran yang diambil selama di sekolah. Kemudian, cari informasi mata kuliah apa saja dari awal sampai akhir yang akan dipelajari di perguruan tinggi dan cocokkan dengan peminatan minat dan bakatnya.

"Jadi, mempelajari betul-betul ingin masuk ke program studi yang mana. Renungi ketika belajar kemarin selama lima semester di sekolah apakah suka atau tidak karena jangan sampai terjebak ke hal yang sama," kata Rahmawati.

Data Indonesia Career Center Network tahun 2017 menyebutkan bahwa lebih dari 87 persen pelajar dan mahasiswa ketika mengambil jurusan di sekolah ataupun perkuliahan tidak sesuai minat. Di samping itu, lebih dari 71,7 persen orang bekerja tidak linier dengan pendidikannya.

Rahmawati menegaskan, hal itu terjadi karena para siswa tidak melakukan riset diri sebelum memilih jurusan kuliah. Bahkan, tidak sedikit pula yang hanya mengikuti program studi yang dipilih teman-temannya atau tuntutan keluarga.

Meski demikian, dia tak menampik jika ada beberapa orang yang sukses karena ia berhasil menyesuaikan diri dari kesalahannya memilih program studi. Namun, hal ini hanya sebagian kecil dari mereka yang mempersiapkan diri sejak dini.

"Meskipun berhasil, sebenarnya itu adalah kasus, bukan pada umumnya. Fase penyesuaian akan jauh lebih ringan apabila jurusan yang dipilih di perguruan tinggi adalah yang sudah pernah dipelajari ketika masih duduk di bangku SMA," ucapnya.

Oleh karena itu, peran pendampingan orangtua dan guru menjadi krusial. Dukungan mereka diharapkan dapat membantu siswa mengenali minat, bakat, dan prospek jurusan yang sesuai sehingga keputusan yang diambil lebih matang.

"Kita masih punya waktu lebih kurang dua minggu untuk menimbang dan mengonsultasikan guna menentukan pilihan mata uji apa yang sesuai dengan jurusan yang dituju," ujar Rahmawati.

Harus mengikuti TKA

Koordinator SNBP Riza Satria Perdana menambahkan, siswa yang memenuhi syarat (*eligible*) atau terbaik yang terpilih oleh sekolah karena memiliki prestasi akademik yang unggul dan masuk kuota SNBP di sekolahnya tetap harus mengikuti TKA. Sistem di pengkalan data sekolah dan siswa (PDSS) akan membatasi apabila siswa *eligible* belum memiliki nilai TKA.

"TKA itu syarat untuk mengikuti SNBP. Jadi, siswa *eligible* yang diisikan sekolah pada aplikasi PDSS harus memiliki nilai TKA," kata Riza.

TKA pertama kali akan digelar untuk jenjang SMA/SMK sederajat pada 1-9 November 2025, pendaftarannya

ditutup pada 5 Oktober. Sementara itu, pelaksanaan untuk jenjang SMP dan SD direncanakan pada Maret-April 2026.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pun telah meluncurkan jadwal SNPMB lebih awal agar memberi waktu kepada murid bersiap mengikuti TKA yang disyaratkan jika ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri (PTN) jalur prestasi atau SNBP.

Selain TKA, tidak ada perubahan pelaksanaan seleksi masuk PTN secara nasional tahun ini. "Kami memastikan siswa yang ikut jalur seleksi prestasi atau SNBP tahun 2026 harus ikut TKA. Sebab, nilai TKA akan menjadi validator dalam seleksi sesuai kewenangan setiap perguruan tinggi negeri," kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Eduart Wolok (Kompas.id, 16/9/2025).

Prestasi

Di SNBP, PTN akan mempertimbangkan prestasi akademik dan nonakademik pendaftar. Komponen nilai rapor semua mata pelajaran paling sedikit 50 persen.

Di samping itu, yang dihitung berdasarkan nilai rapor, paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50 persen. Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh setiap PTN.

Pengumuman kuota sekolah di seleksi SNBP diumumkan pada 29 Desember 2025. Kemudian, sekolah mulai mengisi PDSS pada 5 Januari-2 Februari 2026. Selanjutnya, siswa mulai mendaftar pada 3-18 Februari 2026 dan pengumuman pada 31 Maret 2026.

(TIO)

Negara Ini Alergi Membaca

Markus Togar Wijaya

Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSI) Fakultas Hukum UGM

Pada 1 September 2025, Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah lembaga advokasi hak asasi manusia, dijemput paksa dari kantornya oleh aparat kepolisian.

Penangkapan yang terjadi di luar jam kerja ini berlangsung tak wajar, dipimpin langsung seorang perwira dari Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Namun, hal yang "menggelikan" bagi saya adalah barang yang disita, yaitu koleksi buku pribadi Delpedro. Di antara tumpukan buku tersebut terdapat karya-karya sastra Pramoedya Ananta Toer, literatur yang mengkaji pemikiran Karl Marx, dan buku-buku tentang anarkisme (*Kompas*, 20/9/2025). Pilihan obyek sitaan ini secara gamblang menegaskan bahwa target operasi polisi jauh lebih brutal, mencakup dunia gagasan, pemikiran kritis, dan nalar intelektual.

Aparat mencoba membangun narasi bahwa buku-buku inilah yang menjadi pemantik atau penghasut kerusuhan massa. Ini menunjukkan sebuah lumpatan logika yang berbahaya. Menyimpulkan bahwa kepemilikan buku-buku kritis di ruang privat secara otomatis berujung pada tindakan anarkistis di ruang publik adalah cacat nalar.

Logika semacam ini sama absurdnya dengan menuduh pemilik buku resep masakan bertanggung jawab atas setiap kasus keracunan makanan.

Bibliosida

Menurut saya, senada dengan genosida, peristiwa penyitaan buku ini harus dipahami sebagai sebuah tindakan bibliosida—penghancuran atau pemberangusan pengetahuan—yang menandakan regresi demokrasi di Indonesia. Buku tak lagi dipandang sebagai jendela pengetahuan, tetapi serupa dengan senjata dan narkotika yang sepantasnya disita. Dengan menyita buku, aparat keamanan menyamakan aktivitas intelektual dengan tindakan kriminalitas.

Penyitaan buku dalam kasus Delpedro bukanlah anomali dalam sejarah Indonesia. Ia adalah pengulangan dari sebuah pola represi intelektual yang telah mengakar dan membentang sejak era Orde Baru. Jejak historis ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan gejala dari "penyakit" institusional yang kronis.

Jika kita tilik secara historis, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto membangun kekuasaannya di atas fondasi kontrol informasi yang ketat. Salah satu pilar utama dari kontrol ini adalah pemberangusan sistematis terhadap buku dan barang cetakan yang dianggap mengancam stabilitas politik dan ideologi negara. Bahkan, 2.000 buku dilarang beredar di era Orde Baru dengan alasan politis (*Kompas*, 20/9/2025).

Mekanisme pelarangan ini dilembagakan melalui wewenang Kejaksaan Agung, yang dapat melarang peredaran buku tanpa melalui proses peradilan (UU No 4/Pnps/1963). Dalih yang paling sering digunakan untuk melegitimasi tindakan ini adalah ancaman laten dari ajaran marxisme-leninisme/komunisme. Dalih ini menjadi produk propaganda Orde Baru pascaperistiwa 1965.

Harapan bahwa runtuhnya Orde Baru

pada 1998 akan mengakhiri era pemberangusan buku ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun keran kebebasan berekspresi terbuka lebih lebar, praktik penyitaan dan intimidasi terhadap buku terus berlanjut, seolah hantu Orde Baru menolak untuk mati.

Fenomena ini menyingkap adanya "memori otot otoriter" (*authoritarian muscle memory*) yang tertanam dalam institusi keamanan negara. Ketika dihadapkan pada kritik atau gagasan yang dianggap "berbahaya", aparat refleksi kembali ke pola represif warisan Orde Baru. Narasi "ancaman ideologis" dan "kedaulatan negara" selalu didaur ulang untuk melegitimasi tindakan mereka.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum demokrasi, budaya institusional dalam tubuh aparat keamanan tampaknya belum sepenuhnya tereformasi. Mereka masih memandang gagasan kritis sebagai ancaman keamanan (*security threat*), bukan sebagai bagian esensial dari kebebasan berekspresi (*democratic right*).

Melalui kerangka *information precarity* dari Oltmann dan Vasquez (2025), penyitaan buku oleh aparat keamanan dapat dilihat sebagai contoh sempurna dari penciptaan kerentanan informasi. Tindakan ini mengubah aktivitas yang seharusnya normal dan fundamental dalam masyarakat demokratis—yaitu memiliki, membaca, dan mendiskusikan buku—menjadi sebuah aktivitas yang mengandung risiko hukum.

Dampak dari penyitaan buku Delpredo sangat jelas. Ketika koleksi buku disita dan dijadikan "barang bukti" kejahatan, negara hendak mengirimkan sinyal bahwa akses terhadap pengetahuan tertentu adalah berbahaya. Sinyal itu akan menciptakan iklim ketakutan,

yang menghalangi warga negara secara bebas mengeksplorasi dan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran kritis yang esensial bagi perkembangan nalar dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Strategi yang dilakukan negara adalah menentukan batas-batas mengenai apa yang "aman" untuk dibaca dan dipikirkan. Praktik ini adalah bentuk intimidasi intelektual, yang bertujuan menghasilkan warga negara yang patuh dan lemah imajinatif secara politik.

Orang akan ragu membeli, membaca, bahkan mendiskusikan buku-buku yang dianggap "kiri" atau "radikal", bukan karena isinya, melainkan karena takut dicap sebagai bagian dari kelompok subversif. Dengan demikian, lahirlah wujud pembungkaman paling efektif. Saat warga negara dengan sendirinya mulai menjauhkan pikirannya sendiri.

Perlawanan

Menurut saya, perlawanan terbaik terhadap praktik bibliosida atau pemusnahan buku ini bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan tindakan yang paling mendasar: membaca lebih banyak, berdiskusi lebih sering, dan bertanya lebih berani. Mari kita penuhi kembali rak-rak buku kita, hidupkan kembali lingkaran-lingkaran diskusi, dan sebarkan kepada semua orang bahwa berpikir kritis bukanlah kejahatan, melainkan sebuah kebajikan.

Pada akhirnya, cara paling ampuh untuk melawan gagasan yang dianggap berbahaya adalah dengan gagasan yang lebih baik, bukan dengan borgol. Biarkan buku-buku itu tetap di raknya, dan biarkan pikiran kita tetap bebas mengembara. Sebab, hanya bangsa yang merawat nalarnya yang akan mampu bertahan menghadapi ujian zaman.

Tantangan Tanggulasi Buta Aksara

JAKARTA, KOMPAS — Upaya menihilkan angka buta aksara pada masyarakat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah dalam perjalanan panjang pendidikan Indonesia. Selama lima tahun terakhir angkanya hanya berkurang 0,9 persen atau sekitar 1 juta orang yang sudah mulai bisa membaca dan menulis.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tatang Muttaqin mengungkapkan, angka buta aksara nasional dapat ditekan dari 1,71 persen pada 2020 menjadi 0,92 persen pada 2024. Meski hanya turun sedikit, Tatang menganggap ini sudah optimal.

"Secara persentase, 0,9 persen mungkin kecil. Namun, dari sisi absolut dengan jumlah populasi Indonesia yang demikian banyak ini, masih luar biasa tinggi. Ini merupakan bagian yang tidak mudah untuk betul-betul kita entaskan," kata Tatang dalam keterangan pers, Sabtu (27/9/2025).

Tantangan buta aksara dan literasi masih harus diintervensi secara sistematis dan terintegrasi, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebab, kondisi geografis sulit dijangkau dan sarana pendidikan minim sehingga menjadi minim literasi.

Dia mendorong semua kementerian dan lembaga negara, termasuk pemerintah daerah, bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Pemerintah juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan melibatkan sekolah, lembaga pendidikan nonformal, komunitas literasi, hingga dunia usaha.

Tatang menjabarkan, berbagai program Kemendikdasmen periode 2025 telah dilakukan, di antaranya penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi 35.000 penerima dengan besaran Rp 600.000 per orang serta penguatan program pemberdayaan perempuan dan remaja.

Ada juga upaya merevitalisasi 150 satuan pendidikan nonformal, digitalisasi pembelajaran di 3.000 satuan pen-

Mari kita terus berinvestasi pada manusia, pada guru, pada inovasi digital, dan pada kebijakan inovatif.

Maki Katsuno-Hayashikawa

didikan, hingga pengembangan program sukarelawan pendidikan di tingkat komunitas. "Kami juga terus meningkatkan kolaborasi agar target dari 0,9 persen itu bisa terus ditekan dalam lima tahun," ucapnya.

Pada Hari Aksara Internasional 2025—yang diperingati setiap 8 September—pemerintah tahun ini ingin masyarakat memiliki kesalehan literasi digital demi membangun peradaban. Semangat ini menegaskan literasi tidak sekadar membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan memanfaatkan teknologi digital untuk menghadapi era baru.

Kegiatan Gebyar Pendidikan Nonformal-Informal dan perayaan Hari Aksara Internasional 2025 digelar pada 25-26 September 2025 di kantor Kemendikdasmen, Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya merefleksikan capaian sekaligus menjawab tantangan dalam penuntasan buta aksara di Indonesia.

Dukungan masyarakat

Direktur Regional Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Persekitaran Bangsa-Bangsa (UNESCO) di Jakarta Maki Katsuno-Hayashikawa menambahkan, capaian Indonesia cukup baik.

Berdasarkan data UNESCO Institute of Statistics, tingkat literasi orang dewasa Indonesia usia 15 tahun ke atas 96 persen. Sementara untuk kelompok usia 15-24 tahun hampir universal, mendekati 100 persen.

Menurut Maki, hal ini mencerminkan program pemerintah yang berjalan selama puluhan tahun didukung dengan dedikasi para guru, ketekunan para pembelajar, dan keterlibatan masyarakat di seluruh

Nusantara.

"Namun, terlepas dari pencapaian ini, tantangan tetap ada. Rata-rata nasional sering kali menyembunyikan ketimpangan. Kita tahu bahwa di daerah terpencil dan perdesaan, tingkat literasi masih bisa tidak merata," kata Maki.

Dia menegaskan, Hari Literasi Internasional mengingatkan semua tentang pentingnya literasi yang sederhana, tetapi kuat. Literasi lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah hak asasi manusia, landasan martabat dan pemberdayaan, serta fondasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, di dunia yang berubah dengan cepat, literasi juga memiliki banyak makna dan bentuk, salah satunya dengan munculnya literasi digital. Setiap orang mau tidak mau harus menguasainya.

"Mari kita terus berinvestasi pada manusia, pada guru, pada inovasi digital, dan pada kebijakan inovatif. Kita harus bekerja sama agar literasi tidak hanya hak yang diabdikan dalam undang-undang, tetapi juga menjadi kenyataan hidup bagi setiap orang di Indonesia," tutur Maki.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menegaskan, literasi kini bukan hanya baca tulis, melainkan juga keterampilan hidup di era digital yang sarat peluang sekaligus risiko.

Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan empat kebijakan prioritas: pembelajaran mendalam (*deep learning*) dengan pendekatan *mindful*, *meaningful*, dan *joyful learning* serta tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.

Pendekatan lainnya ialah pemerlakuan tes kemampuan akademik untuk menjamin mutu pendidikan serta program wajib belajar 13 tahun mencakup PAUD selama 1 tahun, SD/MI/paket A selama 6 tahun, SMP/MTs/paket B selama 3 tahun, dan SMA/MA/paket C selama 3 tahun.

"Masih ada kabupaten/kota dengan angka buta aksara tinggi yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah berkomitmen tidak meninggalkan satu pun warga negara di belakang," kata Atip. (TTO)